

ABSTRAK

PELAKSANAAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KSPPS BMT FAJAR BINA SEJAHTERA CABANG PRINGSEWU

Oleh

SAYIDITA ANIS NASFUROH

Penyimpangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah ialah ketika nasabah melakukan wanprestasi (cidera janji). Penelitian ini menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000, serta akibat dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan penelitian menggunakan *nonjudicial case study* dan pendekatan konseptual. Tipe penelitian berupa deskriptif analisis. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen, studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data, penandaan data dan sistemasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000. Meski demikian, jika ditinjau lebih dalam, masih terdapat aspek-aspek praktis yang secara substansi berisiko menimbulkan penyimpangan terhadap esensi hukum islam. Akibat hukum yang terjadi apabila menyimpang dari syarat dan rukun ialah sah atau tidaknya akad, kemudian penyimpangan terhadap kewajiban berakibat hukum wanprestasi. Upaya hukum dalam penyelesaian perkara di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu diklasifikasikan ke dalam dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi.

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Akibat Hukum, Wanprestasi, Upaya Hukum.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMIC PRINCIPLE IN MURABAHAH FINANCING AGREEMENTS AT KSPPS BMT FAJAR BINA SEJAHTERA PRINGSEWU BRANCH

By

SAYIDITA ANIS NASFUROH

A common deviation in the implementation of murabahah financing contracts occurs when a customer defaults on the contract. This study analyzes the implementation of the murabahah financing contract at KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Pringsewu Branch based on the principles of Islamic economics and the DSN-MUI Fatwa No.4 of 2000, as well as the consequences and legal remedies that may be pursued if deviations occur in the implementation of the contract.

This study is a normative-empirical study. The research approach employs a non-judicial case study and a conceptual approach. The research design is descriptive-analytical. The data used consists of primary and secondary data. Data collection methods include document analysis, literature review, and field research. Data processing involves data examination, data coding, and data systematization. Data analysis in this study is conducted qualitatively.

The results of this study indicate that the implementation of murabahah financing contracts at the KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Pringsewu Branch is in accordance with the principles of Islamic economics and the DSN-MUI fatwa No.4 of 2000. However, upon closer examination, there are still practical aspects that, in substance, risk deviating from the essence of Islamic law. The legal consequences of deviating from the conditions and pillars are the validity or invalidity of the contract, and deviations from obligations result in legal liability for breach of contract. Legal efforts to resolve cases at the Pringsewu Branch of KSPPS BM Fajar Bina Sejahtera are classified into two channels: non-litigation and litigation.

Keywords: Sharia Principle, Legal Consequences, Default, Legal Action